

MELAWAN FENOMENA POPULISME DENGAN SEMANGAT PANCASILA SEBAGAI DASAR PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Mathias Jebaru Adon
mathiasjebaruadon@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang

ABSTRAK

Populisme mencuat di tengah situasi ekonomi yang tidak menguntungkan dan kegagalan para politikus moderat menyelesaikan masalah. Ketegangan ini digunakan pemimpin dan partai populis untuk berkuasa dan menguasai oposisi. Mereka menggunakan sentimen-sentimen keagamaan dan identitas-identitas sektarian untuk mendapat dukungan rakyat. Berdasarkan hal itu, penelitian studi ini memiliki tujuan menguraikan persoalan populisme dalam politik global, bagaimana konservatisme agama berkembang dan contoh pemimpin populis Trump yang menunjukkan keterkaitan erat antara konservatisme agama dan populisme. Metodologi yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian kepustakaan dengan pendekatan fenomenologi perkembangan politik populisme dalam kaitannya dengan konservatisme agama baik dalam kancah politik global yang nampak dalam kampanye politik Trump yang menggunakan sentiment keagamaan. Isu yang sama yang digunakan saat kampanye pemilihan kepala daerah di Indonesia. Berhadapan dengan fenomena ini, Indonesia mengarahkan pandangannya pada Pancasila sebagai landasan dalam membangun persaudaraan dan persatuan. Pancasila lahir dari harapan agar bangsa Indonesia dapat bersaudara satu dengan yang lain kendati beraneka ragam.

Kata-kata Kunci: Konservatisme agama, Pancasila Populisme dan Trump.

PENDAHULUAN

Wajah dunia abad ini perlahan berubah. Isu-isu keetnisan yang sebelumnya tabu dan tidak etis menjadi isu seksi yang digunakan demi keuntungan kelompok tertentu. Rasa senasib karena kesamaan agama mudah dibangun namun sering kali bukan untuk mendamaikan melainkan justru menghancurkan. Aksi-aksi teror yang dilakukan *Islamic state In Irag and Syria* (ISIS) menciptakan luka mendalam. Mereka membangun narasi mendirikan kekhalifahan Islam. Dengan paham ini, ISIS bermaksud menyatukan negara-negara Islam yang ada menjadi satu di bawah pimpinan seorang khalifah. Sebagai satu kelompok ‘teroris’ mereka melakukan tindakan teror secara terang-terangan yang membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat luas, masyarakat, negara dan hubungan internasional. Kelompok ini muncul dengan membawa slogan ingin membumihanguskan dunia, terutama di belahan Timur dan Barat

yang ditandai oleh pertumbuhan kapitalisme dan neoliberalisme. Kulminasi dari tindakan mereka membuat stabilitas dunia semakin carut-marut.

Keadaan ini, sempat menumbuhkan kekhawatiran ketika Donal Trump menang pada pemilihan Presiden Amerika pada 8 November 2016 yang lalu. Trump yang biasa merendahkan perempuan, anti-migran, anti-Islam, dan menghina minoritas terpilih sebagai presiden di negara yang dianggap kampium demokrasi. Sebelum di Amerika, di Eropa kelompok-kelompok konservatif melakukan perlawanan dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan, wacana anti-imigran dan anti-Islam. Tidak hanya di Eropa dan Amerika gelombang populisme sedang naik di berbagai tempat di dunia. Pemimpin-pemimpin politik dengan platform politik populisme muncul di beberapa negara (Mohamad, 2016). Di Asia muncul politikus seperti Rodrigo Duterte yang memelopori politik gaya koboi yang melabrak hak asasi dan menebarkan ketakutan terhadap sesuatu yang “asing”. Pada derajat tertentu platform populisme tampak dalam suasana kampanye pemilihan Gubernur Jakarta 2017 yang menebarkan janji-janji kosong yang tidak mungkin diwujudkan karena ketiadaan sumber daya untuk itu.

Kemenangan Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu menjadi salah satu kasus yang mewakili dan menjadi bagian dari populisme yang muncul dalam bentuk mobilisasi politik kelompok sayap kanan Islam. Fenomena ini semakin kentara ketika pilihan presiden 2019, kedua calon presiden memainkan model populisme yang berbeda. Jokowi tampil sebagai sosok populis teknokratik yang lebih soft dan halus sehingga menarik perhatian rakyat yang sudah muak dengan pemimpin ala militer. Sebaliknya, Prabowo tampil sebagai aktor populis yang siap melakukan perombakan total terhadap sistem yang korup. Prabowo memainkan kontinuitas mobilisasi muslim sayap kanan pada pemilihan kepala daerah DKI 2017 untuk mempertahankan dukungan dari kaum muslim tradisional, konservatif, fundamentalis maupun radikal dalam kampanyenya. Hal ini termanifestasi dalam hasil Ijtima Ulama jilid dua versi GNPF yang menetapkan pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai pasangan capres- cawapres pilihan koalisi umat (Ritonga, 2020).

Kaum populis umumnya memiliki pandangan bahwa bangsa atau kaumnya berada dalam posisi tidak menguntungkan atau kalah. Mereka memandang partai politik dan politikus tidak lagi memperjuangkan nasib rakyat tetapi dikuasai oleh kaum elite. Karena itu mereka cenderung melawan dan beberapa tempat menjadi xenophobia. Salah satu yang menjadi contoh dari mobilisasi tersebut adalah aksi berkumpulnya umat Islam di Monumen Nasional (Monas) yang intensif dilakukan terutama menjelang pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 untuk menyikapi pernyataan gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dianggap menghina ayat Alquran. Dalam aksi itu umat Islam semacam mendapatkan identitasnya kembali dalam menghadapi ‘musuh bersama’. Dalam pidato dan orasi aksi tersebut, Habib Rizieq Shihab ketua FPI menyerukan kepada umat Islam untuk tidak memilih pemimpin kafir dalam kontestasi Pilkada yang berlangsung 2017 (Prayogi & Adela, 2019). Hal ini menunjukkan bagaimana

pemimpin populis menggunakan bendera agama sebagai motor politiknya. Karena itu tulisan ini menguraikan bagaimana populisme sangat erat dengan sentimen agama, bahkan menjadikan agama, perbedaan suku dan ras sebagai sarana untuk mendapat dukungan rakyat mayoritas.

Studi-studi sebelumnya juga menggambarkan fenomena populisme sangat erat kaitannya dengan konservatisme agama. Vedi R. Hadiz dalam *bukunya Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (2017) menggambarkan kompatibilitas demokrasi dengan Islam. Menurut Hadiz dalam kondisi tertentu, hal itu bisa terjadi karena aliansi antar kelas yang termarginalkan bersatu dalam satu naungan di bawah bendera Islam. Meski fokus kajian Hadiz mendalam umat Muslim di Indonesia, Mesir, dan Turki, tetapi ia melihat proses formulasi populisme Islam diantara tiga negara ini memiliki kesamaan (Hadiz, 2016). Dalam bukunya ini, Hadiz mengelaborasi lebih mendalam hubungan yang terjadi antara demokratisasi, perubahan sosio-ekonomi, dan hasrat tak tertahankan dari globalisasi yang berpengaruh pada evolusi perjuangan komunitas Muslim di tiga negara tersebut. Dengan menekankan perspektif ekonomi-politik dan sosio-historis, poin penting yang ingin disampaikan oleh Hadiz adalah motivasi kepentingan kelompok dan keuntungan ekonomi justru terbukti dapat melahirkan kekuatan politik Islam di tengah-tengah masyarakat dengan alih-alih ideologi maupun ajaran agama itu sendiri (Hadiz, 2016).

Studi yang sama juga dilakukan Rangga kusumo dan Hurriyah (2017) yang melihat fenomena populisme bukanlah fenomena baru di Indonesia. Gerakan perlawanan populisme dalam sejarah Indonesia muncul dalam berbagai bentuk, sejak masa Orde Lama hingga pasca-Orde Baru. Pada masa Orde Lama, muncul gagasan Nasakom (nasionalisme, agama, komunisme) yang digagas oleh Soekarno sebagai upaya melawan kolonialisme. Di akhir masa Orde Baru, muncul gerakan perlawanan mahasiswa yang menentang kekuasaan rezim otoritarianisme, dan bahkan berhasil menjatuhkan pemerintahan Soeharto. Namun yang berbeda pada tahun 2016-2017, fenomena terkait erat dengan isu keagamaan, yaitu Aksi Bela Islam (ABI) yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) (Kusumo & Hurriyah, 2018).

Namun beberapa argumen menjelaskan bahwa fenomena Aksi Bela Islam merupakan kompetisi antarelite oligarki, atau bagian dari Islamisasi yang lebih luas, seperti mengubah konstitusi menjadi hukum Islam atau sekadar bagian dari upaya merusak proses kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini terkait fenomena populisme Islam yang menggunakan simbol Islam sebagai pemersatu dan landasan mobilisasi gerakan kelompok ini. Namun, studi yang dilakukan Ranggakusumo dan Hurriyah (2017) menunjukkan bahwa walaupun Aksi Bela Islam memperlihatkan adanya unsur-unsur populisme Islam, seperti aliansi multikelas dan narasi satu *ummah*, namun gerakan Aksi Bela Islam ini lebih merupakan populisme Islam semu (pseudo Islamic populism), daripada populisme Islam baru sebagaimana yang diargumentasikan oleh Hadiz.

Studi ini menemukan bahwa hanya sebagian saja unsur yang dipenuhi. Aliansi dari mereka yang terhimpun dalam gerakan ini tidak bertahan lama, serta terjadi pemaknaan yang dinamis terhadap arti *ummah* di antara peserta Aksi Bela Islam sendiri. Berdasarkan hal itu, studi ini memfokuskan penelitiannya pada latar belakang munculnya populisme dalam politik global dalam hubungannya dengan konservatisme agama dan contoh pimpinan populisme Trump yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara populisme dan konservatisme agama. Berhadapan dengan fenomena destruktif ini bangsa Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk menghadapi populisme baik di tingkat nasional maupun di tingkat global yakni Pancasila khususnya sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih dalam tulisan ini karena mampu mengeksplorasi secara mendalam dan detail sebuah fenomena, secara khususnya penjelasan mengenai munculnya bentuk-bentuk populisme dalam politik global dan kaitannya dengan konservatisme agama yang tampak dalam pimpinan politik populisme Trump. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan fenomenologi ini membantu penulis memahami fenomena populisme yang sedang mencuat di tanah air yang hadir dalam peristiwa pemilihan kepala daerah yang menggunakan platform populis untuk menjaring suara rakyat. Hal ini secara jelas tampak dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan capres dan cawapres periode 2019-2024.

Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang kebenarannya tidak difondasikan pada teks-teks suci atau pemikiran deduktif, juga yang tidak terdapat dalam pemikiran para ahli atau politikus (Riyanto, 2015). Tetapi sebuah kebenaran yang berasal dari pengalaman subyek dalam melakukan peziarahan hidupnya. Dengan kata lain, kebenaran penelitian fenomenologi tidak bertitik tolak dari banyaknya sampel yang diambil tetapi dari pengalaman subyek dalam melakukan ziarah hidupnya. Artinya pengalaman subyek memiliki kebenaran yang tidak bisa ditangguhkan hanya karena dialami satu orang atau sekali terjadi. Mayoritas tidak bisa menghalangi kebenaran pengalaman subyek sebab mayoritas terhimpun dari kebenaran pengalaman subyek-subyek. Karena itu dalam penelitian fenomenologi mayoritas menegaskan pengalaman subyek.

Teknik penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan penggunaan data-data sekunder yang diperoleh dari pemberitaan media masa dan buku-buku kepustakaan yang membantu penulis mengerti latar belakang populisme. Data-data sekunder yang dihimpun dari media masa dimanfaatkan untuk memahami secara mendetail fenomena populisme yang sedang mencuat dalam politik global dan yang sudah merambah di tanah air. Sedangkan studi kepustakaan yang dihimpun dari buku-buku membantu penulis untuk melihat secara jernih dan menyeluruh latar belakang dan perkembangan populisme dalam kaitannya dengan konservatisme agama. Sumber kepustakaan ini juga dipakai

untuk menguraikan peran dan fungsi Pancasila dalam menangkal fenomena populisme di tanah air.

PEMBAHASAN

Populisme Dalam Politik Global

Populisme adalah penyakit yang bermula dari sederet ketimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ketimpangan sosial ini merupakan akibat dari pengabaian hak-hak asasi manusia. Pengabaian hak-hak asasi itu ditandai dengan penolakan terhadap suku, ras dan agama tertentu. Populisme dibentuk terutama ketika situasi menekan dan ketimpangan dalam kehidupan ekonomi. Suatu kondisi yang diwarnai oleh perebutan kekuasaan dalam ekonomi produksi (kapitalis) dan perebutan jabatan dalam bidang politik. Kehadiran para politikus-politikus populis merupakan bias dari dunia yang tidak seimbang. Dunia tidak seimbang yang dimaksud adalah jurang antara yang kaya dan miskin.

Di belahan Negara Timur fakta dehumanisasi merupakan pelukisan hegemoni atas kehendak rakyat yang ingin bebas dari keterbelengguan. Negara-negara di Timur mengalami dekadensi dalam sistem ekonomi dan degradasi dalam birokrasi karena di jajah oleh negara-negara kapitalis yang ditunjukkan oleh kekuasaan Amerika dan negara-negara Eropa di timur. Ketegangan ini mencuat pada runtuhnya gedung raksasa *World Trade Center* (WTC) yang melambangkan keadayaan Amerika pada 11 September 2001. Aksi teror ini tidak hanya terjadi di Amerika tetapi juga di Eropa sebagai akibat ketimpangan aset dan distribusi kekuasaan yang tidak adil. Kelompok-kelompok yang putus asa ini membentuk sebuah wadah perjuangan bersama dengan nama Al-Qaeda Iraq (AQI) sebagai upaya penyatuan barisan perjuangan melawan Amerika dan sekutunya (Kleden, 2016). Dari sinilah mereka melancarkan serangan bom pada pemerintahan Irak dan AS.

Pada tanggal 13-14 November 2015 kelompok ISIS yang merupakan pecahan dari Al-Qaeda meluncurkan serangan ke Paris. Kali ini, simbol kebebasan masyarakat Paris yang kosmopolitan menjadi sasaran teror, seperti stadion olah raga, gedung konser dan restoran. Peristiwa ini semakin memperkokoh bangunan populisme di Eropa dan Amerika yang pada dasarnya adalah isu lama yang terkubur di bawah arus hidup masyarakat. Isu-isu populisme kembali mencuat ketika gelombang pengungsi dari Timur Tengah mencari suaka di Eropa dan Amerika dan tidak mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat setempat. Penolakan ini semakin menyuburkan tumbuhnya pemimpin populis baik di Eropa maupun di negara-negara Asia dan Afrika. Selain itu, situasi ini diperparah karena stabilitas ekonomi yang tidak seimbang dan kegagalan politikus moderat menyelesaikan masalah juga turut menguatkan munculnya politikus-politikus yang berhaluan populis. Di Prancis misalnya Mariane Le Pen dengan Partai Front Nasionalnya menjadi populer kembali di tengah angka pengangguran di Prancis yang menempati posisi kedua tertinggi di antara negara G-7 dan sentimen negatif tentang Uni Eropa serta perdagangan bebas pada umumnya (Mohamad, 2016).

Selain itu, kaum populisme umumnya juga menggunakan sentimen-sentimen keagamaan seperti Islamophobia untuk mendapat dukungan rakyat. Mengikuti pernyataan-pernyataan Donald Trump selama kampanye yang melihat “Timur” dan “asing” sebagai ancaman yang tidak pernah berhenti meringsek. Pernyataan-pernyataan Trump mencapai puncaknya ketika ia mengeluarkan keputusan presiden yang melarang warga berpenduduk mayoritas muslim untuk masuk ke AS dan rencana membangun tembok pembatas di perbatasan Amerika dengan Meksiko.

Kebijakan Trump menuai kritik dari berbagai tempat dan pada saat yang sama memunculkan pemimpin populis di berbagai negara di Asia yang juga memanfaatkan sentimen agama (Garadian, 2017). Di Indonesia populisme mendapat lahan yang subur, isu-isu PKI yang telah lama terkubur dimunculkan kembali guna menjatuhkan lawan politik. Drama kaum populis di Indonesia tampil dalam arena pertarungan capres-cawapres 2019 yang berakar kuat pada Pilkada DKI 2017. Prabowo menempatkan Jokowi lawan politiknya sebagai tokoh antagonis. Strategi kemenangan Anis-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI yang mengkombinasikan unsur moralitas dan simbolisme Islam yang disatukan dengan gaya kepemimpinan populis digunakan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno untuk mengamankan konstituensi massa Muslim konservatif dan radikal. Hal ini nampak dalam narasi-narasi yang didemonstrasikan Amien Rais yang menempatkan partai oposisi pendukung gubernur DKI petahana sekaligus koalisi Jokowi sebagai “partai setan” dan parpol oposisi anti-Ahok (Gerindra, PKS, dan PAN) sebagai “partai tuhan” (Garadian, 2017). Dengan kata lain, kaum populis memiliki kecenderungan proteksionisme dan di beberapa tempat cenderung xenophobia.

Kaitan Konservatisme Agama dan Populisme Di Indonesia

Bagian yang paling menyedihkan dalam sejarah suatu bangsa dan negara adalah ketika persaudaraan dalam masyarakat hanya terbatas pada kemurnian etnis kelompoknya sendiri. Masyarakat dikotak-kotakkan menurut suku, ras dan agama yang dianutnya. Perbedaan ini membawa konsekuensi pada pemisahan batas budaya dan batas agama. Hasilnya berbagai kecenderungan populis yang memusuhi “Yang lain” tampak bergabung di sini (Madung, 2018). Dalam konteks Indonesia, fenomena ini membawa dampak pada menguatnya militansi keagamaan bersamaan dengan meluasnya pengaruh politik yang diperolehnya. Kesuksesan di panggung politik ditafsirkan sebagai amanah untuk meningkatkan penghayatan keagamaan. Antusiasme warga Islam di beberapa wilayah setelah kemenangan pasangan usungan PKS menjadi salah satu contoh kebenaran pandangan ini. Pengalaman kemenangan Pilkada Jakarta seolah-olah mempertegas posisi elemen-elemen Islam sebagai standar normatif bagi manuver politik semua kontestan pemilu, entah legislatif, eksekutif maupun calon dari kubu koalisi pemerintah atau oposisi di tanah air (Margiansyah, 2019).

Selain itu, perjuangan perebutan politis ini sering didasarkan pada rasa ketidakpuasan terhadap rezim yang berlaku. Dan menempatkannya sistem

pemerintahan yang berlangsung sebagai tirani yang harus ditumbangkan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sumber daya yang melimpah tetapi kondisi masyarakatnya terpuruk mendorong dan menjadi dasar bagi kaum populis untuk memikirkan alternatif lain dasar bagi penyelenggaraan negara, dan mereka menemukannya dalam syariat. Kaum populis menjadikan dasar agamanya sebagai perjuangan politiknya. Gagasan ini diperkuat dengan contoh Negara-Negara Timur Tengah yang kaya akan minyak, warganya makmur karena menerapkan Syariat Islam sebagai aturan penyelenggaraan negara. Hal ini memotivasi pemimpin populis untuk memanfaatkan simbol dan sentimen agama dalam meraup suara mayoritas. Dengan kata lain, identitas agama, suku dan ras menjadi motor untuk tampil dalam panggung politik guna menduduki jabatan.

Namun di belahan lain, Eropa dan Amerika terjangkit Islamophobia. Wajah Islam di sering ditunjukkan sebagai agama yang penuh dengan kekerasan, kejam dan suka berperang. Munculnya anggapan dan tuduhan semacam ini dikarenakan tindakan yang dilakukan sebagian kecil umat Islam yang salah kaprah dalam menyampaikan nilai-nilai Islam serta tampilnya pemimpin populis islam yang menggunakan wajah kekerasan untuk menaklukkan rezim yang berlaku. Selain itu, banyaknya konflik yang terjadi antar umat Islam sendiri, ditambah dengan maraknya aksi teror di berbagai belahan dunia terhadap kaum nonmuslim semakin memperkeruh wajah Islam. Fenomena ini juga dijadikan sarana oleh kaum populis nonmuslim untuk menjaring suara sebagaimana yang dilakukan Trump untuk memperoleh dukungan mayoritas rakyat Amerika yang telah terjangkit Islamophobia. Dalam kancah egoisme ini, Trump menjadikan tiap yang “asing” dari “luar”, sosialisme, komunisme, Yahudi, Islam membangkitkan waswas (Mohamad, 2016).

Padahal xenophobia sebagai penolakan kolektif terhadap sesuatu yang asing tidaklah selalu tepat bila dikaitkan dengan agama, ras dan suku tertentu. Apa yang belakangan ini disebut sebagai Islamophobia yang berkecamuk dalam politik global bukan gejala kejiwaan sosial tetapi lebih berupa gema sejarah konflik politik yang panjang yang melibatkan orang secara luas, yakni ketika agama tertentu secara khusus Islam dikibarkan dalam keyakinan kebencian dan perang. Situasi ini seolah-olah mendulang kisah “Holocaust”, sebuah nama yang mengukir kehancuran kemanusiaan sejak awal penciptaan. Suatu populisme yang berkecamuk dengan agama dan fanatisme yang telah menciptakan paranoia, rasa terancam dan kebencian yang tak memaafkan bagi bangsa Yahudi. Auschwitz-Birkenau yang terletak di Polandia adalah bukti fanatisme dan kebencian dari insting manusia yang jahat. Birkenau adalah stasiun perhentian Kereta Api, di mana orang dijebloskan ke kamp konsentrasi. Auschwitz adalah kamp konsentrasi di mana satu juta tiga ratus orang digiring ke “pembantaian” tersebut. Sembilan puluh persen di antaranya berasal dari bangsa Yahudi; yang lain kaum gelandangan (gipsi), tawanan perang, kelompok etnis lain dan para religius (Riyanto, 2014).

Munculnya populisme dalam politik global menunjukkan bahwa irasionalitas, kemasabodohan tampaknya telah terjangkit di berbagai tempat.

Pantaslah Trump dicap pembohong yang ulung, pengusaha culas yang dengan mudah merendahkan perempuan dan menghina minoritas (“Waswas Trump,” 2016). Dalam arti ini, Trump memang seorang populis meskipun ia tidak menyebut dirinya seorang populis tetapi dalam berpikir dan bertindak *the American People First* selalu menjadi referensi utama ia menyatakan diri sebagai seorang populis ulung.

Terpilihnya Trump dalam pemilihan Presiden Amerika bagaimanapun telah mengirimkan syarat ketidakpastian di antara penduduk, khususnya penduduk Amerika yang muslim, juga sekutu Amerika yang mayoritas muslim. Janji-janji Trump selama kampanye menjadi ancaman bagi kaum minoritas dan imigran. Kekhawatiran itu juga dialami oleh kaum Lesbian, Gay dan Trans Gender (LGBT) yang dianggap penyebab guncangnya nilai-nilai etis dan agama dari abad ke abad. Bagi imigran muslim hal ini menjadi tantangan yang berat karena khawatir dicurigai sebagai teroris seperti yang terjadi dengan kaum muslim pada umumnya. Hari-hari pertama kepresidenan Trump, ia mengeluarkan dekret kepresidenan tentang kebijakan imigrasi terhadap pelarangan masuk tujuh negara sumber teroris (Dhakidae, 2016).

Namun perintahnya menuai kritik baik secara nasional maupun internasional. Inilah untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Amerika, seorang presiden membalik internasionalisme yang selama ini telah menjadi kebanggaan dan perhatian negara Paman Sam tersebut. Amerika menjadi potret “si Jahat” yang memerangi “Timur” dan “Islam”. Jika kebencian tidak segera direndam tak terbayang nasib Amerika, juga dunia setelah ini. Ancaman serangan terhadap orang asing akan merebak di Amerika. Lalu sebagai balasan, pekik pertempuran terhadap Amerika dan Barat secara keseluruhan dari kalangan radikal akan bertambah terus (“Waswas Trump,” 2016). Untungnya, Trump tidak terpilih lagi pada periode kedua. Dengan kata lain populisme berkaitan erat dengan konservatisme agama.

Contoh Kepemimpinan Populisme Trump

Sebagai seorang populisme, Trump melihat Amerika tidak memiliki harapan dan menderita. Karena itu ia menempatkan rakyat Amerika sebagai yang pertama dan utama. Trump melihat komitmen semacam itu telah hilang dari kebijakan luar negeri, perdagangan dan kebijakan imigrasi Amerika. Ia menilai Amerika terlalu sibuk memikirkan bangsa lain melalui kerja sama politik dan ekonomi yang justru memperlemah Amerika sendiri. Kini Amerika kehilangan lapangan pekerjaan dan neraca perdagangan, buktinya ungkapan “Made In Amerika” tidak terdengar lagi. Padahal bangsa-bangsa lain dulu bangga terhadap Amerika. Karena itu, dalam kampanyenya ia menggunakan platform “Making Amerika Great Again” dan tidak ada yang berpikir demikian selain dirinya sendiri (Mohamad, 2016). Hanya dialah yang mampu menyelesaikan dan membangkitkan Amerika yang sedang lumpuh dalam tingkat yang setinggi-tingginya.

Dalam arti yang demikian Trump adalah seorang populisme revolusioner kiri Marx yang melihat ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Amerika sebagai

akibat dari kekayaan Amerika jatuh ke tangan elite. Apakah Trump berhasil? Karl Marx mungkin contoh yang paling mudah disebut. Menurut Marx segala hak untuk hidup secara manusiawi telah dirampok oleh para kapitalis. Begitulah Marx seperti mendeklarasikan diri sebagai sosok yang membela para buruh dengan menunjukkan prinsip-prinsip sosialisme kehidupan (Riyanto, 2013). Namun sejarah membuktikan bahwa Marx gagal karena ia memaknai kapasitas sosial manusia secara sepihak. Ideologi Marx telah menjadi ideologi mati. Tidak ada negara yang melaksanakan apa yang menjadi filsafat Marx. Sekalipun Cina negara komunis tetapi ekonomi yang dipraktekkan jauh dari apa yang diajarkan Marx.

Pancasila Sebagai Asas Kehidupan Bangsa Indonesia

Berhadapan dengan kecenderungan populisme yang sedang berjangkit dalam kehidupan nasional maupun global, bangsa Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa khususnya sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Dalam rumusan sila kedua, cita-cita kemanusiaan menjadi jiwa kemerdekaan. Bung Karno pada Pidato 1 Juni 1945 berkata, “Kita bukan saja mendirikan Negara Indonesia Merdeka tetapi harus pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa”. Artinya Indonesia dibangun di atas kesadaran Internasionalisme yang diberi bobot dan sentuhan spirit egalitarianisme. Kesadaran akan kesamaan dan kesederajatan antar bangsa-bangsa ini dilandasi atas dasar martabat manusia. Karena itu bangsa Indonesia dengan tegas diperjuangkan agar penjajahan harus dihapuskan dan ketidakadilan harus disingkirkan (Latif, 2011).

Dalam kursus Pancasila 5 Juni 1958 Soekarno mengatakan kalau ia tidak dapat membayangkan suatu bangsa dapat terasing dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu, ia mengingatkan bahwa kebangsaan yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia bukan kebangsaan yang menyendiri, apalagi *chauvinisme* tetapi kebangsaan menuju persatuan dan persaudaraan dunia (Kaelan, 2013). Gagasan ini sesuai dengan dasar hidup masyarakat Indonesia yang memiliki adat ketimuran; toleransi, ramah, sopan santun, saling menghargai dan gotong-royong. Dinamika hidup seperti ini berimplikasi pada kesadaran akan martabat manusia. Narasi yang disebut Etnis Rohingya yang tinggal di Aceh sebagai pengungsi menunjukkan betapa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi jiwa bangsa Indonesia. Semangat sila kedua ini mendorong masyarakat Aceh mengambil tindakan segera, arif dan konsisten dalam menghormati martabat manusia. Dalam semangat itu bangsa Indonesia tidak terperangkap dalam sikap antipati yang membuat kita menolak keberadaan para pengungsi. Kita pun tidak terbuai dengan tidak membangun kesadaran otonomi kemanusiaan yang membuat mereka terus bergantung pada kita.

Di antara dikotomis antara sikap antipati dan simpati, kita memilih dengan sadar untuk bersikap empati sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Hanafi, 2018). Kesadaran inilah yang diungkapkan oleh bung Karno secara tegas dan Arif, “Internasionalisme tidak dapat tumbuh subur kalau tidak berakar dalam bumi nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat tumbuh subur kalau

tidak hidup dalam taman sari Internasionalisme”. Dengan kata lain ada hubungan antara nasionalisme dan internasionalisme dan orientasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bersifat ganda, keluar: ikut memperjuangkan keadilan dan perdamaian, ke dalam; memuliakan hak-hak asasi manusia sebagai Individu maupun kelompok.

Berhadapan dengan wacana anti-migrant, anti-islam yang digalang oleh negara-negara di Eropa dan Amerika, Indonesia menghadirkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua yang memiliki wawasan kebijaksanaan global dan kearifan lokal yakni suatu komitmen pada ketertiban dunia, perdamaian dan keadilan serta pemulihan terhadap hak-hak asasi manusia dalam suasana persaudaraan. Atas dasar inilah para pendiri bangsa menolak paham neoliberalisme-individualisme.

Berkaitan dengan isu-isu keetnisan yang merongrong NKRI, Pancasila menjadi rujukan utama. Pancasila adalah jiwa, pikiran dan hasrat sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal abadi, kata Bung Karno. Dengan kata lain adanya Indonesia karena para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Sebaliknya ketika Pancasila disisihkan pada saat itu NKRI hanya menjadi catatan sejarah. Karena itu, Pancasila menjadi tali pengikat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai ragam suku, bahasa, agama dan kultural.

KESIMPULAN

Munculnya gelombang populisme diberbagai belahan dunia dengan pemimpin yang menggunakan platform populis menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di dunia. Mereka menyalakan insting terburuk dalam diri manusia; fanatisme, racist, sexist, anti gay dan islamphobia namun sungguh irasional mereka terpilih menjadi pemimpin. Kekecewaan sebagian pemilih atas terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45 AS bukan tanpa alasan. Pernyataan-pernyataan kontroversial Trump selama kampanye menimbulkan kekhawatiran bagi kaum minoritas misalnya larangan muslim dan pengungsi Suriah masuk ke Amerika. Tidak hanya di Amerika dan Eropa gelombang populisme juga menjangkit di tanah air ketika isu-isu keetnisan dan identitas -identitas sektarian sengaja di pompa untuk meraup suara rakyat. Situasi ini tentu tidak etis bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang didasarkan atas Pancasila.

Pancasila sebagai warisan falsafah hidup dan cerminan impian bersama anak bangsa adalah pedoman etis kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi kriteria bagi setiap warga negara Indonesia bagaimana hidup sebagai warga negara yang baik. Dengan begitu Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama dan etnis namun satu jua dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika dapat menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa di dunia yang sedang terjangkit populisme. Sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, bahwa Indonesia dibangun bukan saja mendirikan Negara Indonesia Merdeka tetapi suatu negara yang

menuju kekeluargaan bangsa-bangsa. Maka UUD 1945 dengan tegas menyatakan komitmennya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhakidae, D. (2016). Trumpisme. *Kompas*.
- Garadian, E. A. (2017). Membaca Populisme Islam Model Baru. *Studia Islamika*, 24(2). <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i2.5708>
- Hadiz, V. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hanafi, H. (2018). Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 56–63. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056>
- Kleden, F. (2016). Membaca Fenomena ISIS (Islamic State Of Iraq And Syria) Dan Strategi Membangun Damai, dalam Agama dan Terorisme. In *VOX Para Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero*. STFK Ledalero.
- Kusumo, R., & Hurriyah. (2018). Populisme Islam di Indonesia : Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik*, 4(1).
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta (Ed.)). Gramedia Pustaka Utama.
- Madung, O. G. (2018). Populisme, Krisis Demokrasi, Dan Antagonisme | Populism, the Crisis of Democracy, and Antagonism. *Jurnal Ledalero*, 17(1), 58. <https://doi.org/10.31385/jl.v17i1.129.58-76>
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.783>
- Mohamad, G. (2016). "Trump." *Tempo*.
- Prayogi, I., & Adela, F. P. (2019). Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 31–43. <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>
- Ritonga, A. D. (2020). Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.32734/politeia.v12i1.3170>
- Riyanto, A. (2013). *Menjadi Mencintai: Berfilsafat Sehari-Hari*. Kanisius.
- Riyanto, A. (2015). Kearifan Lokal-Pancasila Butir-butir Filsafat "Keindonesiaan." In A. Riyanto, J. Ohoitmur, C. B. Mulyatno, & O. G. Madung (Eds.), *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Kanisius.

- Riyanto, A. (2014). “Kebahagiaan” Itu Tidak Ada: Puisi-Puisi Auschwitz. In E. R. L. Tinambunan & K. Bala (Eds.), *Di mana Letak Kebahagiaan? Penderitaan Harta, Paradoksnya (Tinjauan Filosofis Teologis)*. STFT Widya Sasana Malang.
- Waswas Trump. (2016). *Tempo*.